

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**  
(Permendagri 90 Tahun 2019 dan Perpres 33 Tahun 2020)



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH**

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 900/ -Setwan

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Renja Sekretariat DPRD maka dipandang perlu mementuk Tim Penyusun Renja Setwan Perubahan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
9. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Plt. Sekretaris DPRD Penanggung Jawab
2. Kepala Bagian Program dan Keuangan Ketua
3. Kepala Bagian Umum Wakil Ketua
4. Kepala Bagian Persidangan dan Per UU Wakil Ketua
5. Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Wakil Ketua
6. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran Sekretaris
7. Kasubag Verifikasi Anggota
8. Kasubag Akuntansi dan Pelaporan Anggota
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian
10. Kasubag RT dan Perlengkapan Anggota
11. Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Anggota
12. Kasubag Kajian Per UU
13. Kasubag Persidangan dan Risalah Anggota
14. Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Anggota
15. Kasubag Pengawasan dan Kerja Sama. Anggota

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : September 2022

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. DADANG NUGRAHA**  
NIP. 196601311986031004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH**

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR : 900/ - Setwan**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf (b) diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 untuk ditetapkan dengan Keputusan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
12. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
18. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Memperhatikan :  
1. Keputusan DPRD No. 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tangerang.  
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang tentang Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022.

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
- b. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;

- e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- f. Tujuan adalah sesuatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;
- g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
- h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
- i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- j. Kegiatan adalah aktivitas rutin sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

## **Pasal 2**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **Pasal 3**

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Perubahan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

## **Pasal 4**

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada Tanggal : September 2022

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. DADANG NUGRAHA**

NIP. 196601311986031004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

---

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 Perubahan. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud penjabaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan oleh satuan unit organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja Perubahan yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada setiap tingkat sasaran.

Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukkan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para *stakeholder* sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Kami berharap Rencana Kerja Perubahan yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan kegiatan, serta menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tigaraksa, September 2022

**Pt. SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. DADANG NUGRAHA**  
NIP. 196601311986031004

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021.....	19
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	33
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	52
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	53
3.3 Program dan Kegiatan .....	54
3.4. Target Kinerja Program dan Kegiatan .....	63
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	73
4.1 Program Dan Kegiatan.....	73
BAB V : P E N U T U P .....	80

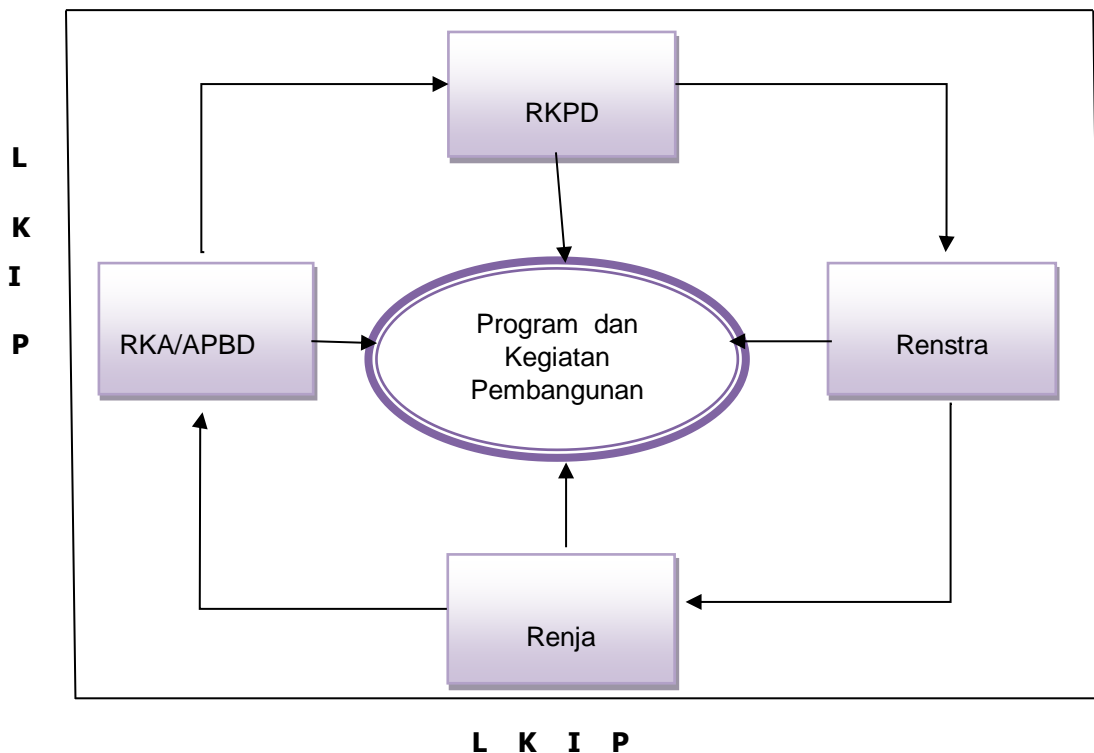
## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja



(Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh SKPD.

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, Renja OPD merupakan pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan OPD guna mencapai visi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permendagri Nomor 050-3778 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
2. Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);



3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi;
7. Adanya Renja diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan motivasi seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target kinerja;
8. Diharapkan Renja dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggara Administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;



- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum.
  1. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c. Bagian Program dan Keuangan.
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
  2. Sub Bagian Verifikasi.
  3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
  2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi.
  2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **A. Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**

Bagian Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

Bagian Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD dan kesehatan DPRD;
- j. Pelaksanaan administrasi pendataan keanggotaan DPRD;
- k. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- l. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD.

Bagian Umum terdiri atas :

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

1). *Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian*

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan administrasi Sekretariat DPRD;
- e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pegawai;
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;



- i. Mempersiapkan, mengusulkan atau menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan dan kearsipan serta perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD kepada bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;
- d. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- i. Menyediakan, mengurus, menyimpan serta mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD;
- k. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;



- m. Membagi tugas pelaksanakn kegiatan kerumahtangaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- n. Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan kepada bawahan;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- b. Merencanakan kegiatan DPRD;
- c. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- d. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- e. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- g. Merancang administrasi kunjungan kerja pimpinan DPRD;
- h. Memfasilitasi dalam penerimaan tamu kunjungan kerja;
- i. Mengelola administrasi perjalanan dinas daerah pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Memfasilitasi layanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD;
- k. Memfasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
- l. Melakukan administrasi pendataan keanggotaa DPRD;
- m. Mengelola administrasi keanggotaat DPRD;
- n. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan humas, protokol dan publikasi;
- o. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian



- humas, protokol dan publikasi;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**

Bagian Program dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. Pemverifikasian perencanaan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Pengelolaan koordinasi anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keuangan terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
- Sub Bagian Verifikasi.
- Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

### *1). Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.*

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- b. Menyusun bahan perencanaan;
- c. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- d. Merencanakan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;



- e. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;
- g. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- h. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). *Sub Bagian Verifikasi*

Sub Bagian Verifikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian verifikasi;
- b. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- c. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK KD untuk pengajuan SPP dan SPM-UP/SMP-GU/SPM-TU/SPM-LS;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan verifikasi;
- h. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian verifikasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

2). *Sub Bagian Verifikasi*

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab



kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- b. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- f. Menganalisa laporan keuangan;
- g. Menganalisa laporan kinerja;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;



- h. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventarisasi masalah
- j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat.

Bagian Persidangan terdiri dari :

- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
- Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

1). Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian kajian perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- c. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- e. Membuat konsep bahan penyiapan draft peraturan inisiatif;
- f. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
- g. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;
- h. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan;
- i. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian persidangan dan risalah;
- b. Merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang;
- c. Menyusun risalah, notulen catatan rapat;



- d. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- e. Memfasilitasi rapat DPRD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- g. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD yang meliputi sarana, prasarana makanan dan minuman serta gaji staf fraksi;
- h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan persidangan dan risalah;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian persidangan dan risalah;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
- n. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- o. Mengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi layanan kebutuhan kerja Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan pendataan keanggotaan DPRD ;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Alat kelengkapan DPRD;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**

Bagian Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD perubahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan peraturan



- daerah pertanggung jawaban APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati;
  - f. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Aspirasi Masyarakat;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi perumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
  - m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;
  - n. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;

Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi;
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.

1). *Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi*

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan perubahan anggaran PPAS perubahan;
- c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD perubahan;
- d. Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- e. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6



(enam) bulan berikutnya;

- f. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawab Bupati;
- g. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- i. Memfasilitasi reses DPRD;
- j. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- k. Menyusun pokok pikiran DPRD;
- l. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). *Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.*

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi pengawasab dan kerja sama;
- b. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- c. Merancang bahan rapat internal DPRD;
- d. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik;
- e. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- f. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD;



- i. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasionalnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, maka sebagai unsur pelayanan Sekretariat DPRD dituntut dapat melaksanakan perannya pada setiap fungsi, diantaranya :

1. Peran Setwan pada fungsi Legislasi.
  - Kajian perda.
  - Evaluasi terhadap penyiapan penyusunan rancangan perda.
  - Penyusunan propemperda.
  - Penyusunan reperda inisiatif.
  - Pembahasan raperda inisiatif dan eksekutif.
2. Peran Setwan pada Fungsi Budgeting.



- Perencanaan Program.
  - Perencanaan Anggaran.
  - Pelaksanaan Anggaran.
3. Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan.
- Evaluasi Anggaran dan Kinerja SKPD oleh DPRD
  - Kajian Pelaksanaan Kebijakan.
  - Analisis Pengaruh Masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
  - Dukungan Data.

Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu :

1. Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.
2. Peningkatan SDM.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.
5. Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.
6. Peningkatan Koordinasi Dengan SKPD atau Lembaga Terkait Lainnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

##### **1.1.    Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja Kabupaten dan kaitannya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2.    Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3.    Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

##### **1.4.    Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen



## **BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

## **BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV     P E N U T U P.**



## BAB II

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Mengacu pada rencana strategis Tahun 2019-2023 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah.



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022  
Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPd dan Renstra OPD terhadap RPJMD								
4.02.001.201	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD								
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan		7 dok	7 dok	4 dok	57,14	7 dok		
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan</b>								
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan		1 dok	1 dok	-	0	1 dok		
4.02.001.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan</b>								



Sekretariat DPRD

		<b>administrasi pegawai</b>								
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya		350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel		
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek		50 orang	52 orang	31 orang	59,62	50 orang		
4.02.001.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana penunjang kantor</b>								
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor		5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis		
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	7 jenis	4 jenis	57,14	7 jenis		
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		16 jenis	7 jenis	5 jenis	71,43	7 jenis		
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		4 jenis	4 jenis	3 jenis	75,00	4 jenis		
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu		1948 dus	5000 dus	1100 dus	22,00	5000 dus		
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja		223 kali	85 kali	61 kali	71,76	85 kali		
4.02.001.207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya mebel</b>								
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel		2 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		
4.02.001.208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa komunikasi</b>								
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi		9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit		
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang		



Sekretariat DPRD

4.02.001.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai</b>								
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas		33 unit	4 item	4 item	100	4 item		
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel		5 jenis	3 item	2 item	66,66	3 item		
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin		7 jenis	15 item	6 item	40,00	15 item		
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung		1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit		
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor		-	1 unit	1 unit	100	1 unit		
4.02.001.215	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD</b>								
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD		50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang		
4.02.001.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up		38 orang	50 orang	-	-	50 orang		
4.02.001.216	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD</b>								
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD		41 kali	95 kali	50 kali	52,63	95 kali		
4.02.002	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD</b>								
4.02.002.201	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase pembentukan peraturan daerah</b>								
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda		-	2 keg	1 keg	50	2 keg		



Sekretariat DPRD

4.02.002.201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda		14 perda	16 perda	4 perda	25	16 perda		
4.02.002.201.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik		-	-	-	-	-		
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya tata tertib		1 dok	1 dok	-	-	1 dok		
4.02.002.202	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase pemenuhan pembahasan anggaran</b>								
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD		1 kali	1 kali	-	-	1 kali		
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran		1 kali	2 kali	-	-	2 kali		
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.203.01	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan</b>								
4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		



Sekretariat DPRD

4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan	-	2 kali	2 kali	100	2 kali		
4.02.002.204	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan kapasitas DPRD</b>							
4.02.002.204.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	6 kali	5 kali	83,33	6 kali		
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	114 kali	12 bulan	9 bulan	75,00	12 bulan		
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75,00	12 bulan		
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	90 kali	100 kali	48 kali	48,00	100 kali		
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya program kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.002.205	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan Reses</b>							
4.02.002.205.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja	-	3 kali	-	-	3 kali		
4.02.002.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	-	-	-	-	100 dok		
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses	2 kali	3 kali	2 kali	66,66	3 kali		
4.02.002.206	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kode etik</b>							
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.002.207	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi</b>							
4.02.002.207.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers	51 kali	12 bulan	9 bulan	75	12 bulan		
4.02.002.208	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan</b>							



Sekretariat DPRD

---

		<b>koordinasi dan konsultasi DPRD</b>								
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD		77 kali	90 kali	73 kali	81,11	90 kali		
4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD		1 dok	1 dok	-	-	1 dok		



Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dari 2 program, 17 kegiatan dan 51 kegiatan Tahun 2022 yang telah dilaksanakan apabila melihat persentase capaian kinerja telah mencapai rata-rata 70 sampai 100 persen, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum memenuhi target. Capaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Realisasi Program/Kegiatan  
Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Persentase
<b>4.02.001</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	4 dok	57,14
4.02.001.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52 orang	31 orang	59,62
4.02.001.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	4 jenis	57,14
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5000 dus	1100 dus	22,00
4.02.001.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	3 item	2 item	66,66
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 item	6 item	40,00
<b>4.02.002</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>			
<b>4.02.002.201</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>			
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 keg	1 keg	50,00



4.02.002.201.02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	16 perda	4 perda	25,00
4.02.002.204	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 kali	48 kali	48,00
4.02.002.205	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	3 kali	2 kali	66,66

Tabel 2.2. merupakan target capaian kinerja berdasarkan capaian per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang targetnya dibawah 70 persen, apabila dilihat secara keseluruhan dari 2 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan terdapat program yang capaiannya rata-rata 70 – 100 persen namun pada pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya 100 persen dan realisasi keuangannya masih dibawah 70 persen seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022  
Yang Realisasi Keuangan Dibawah 70 Persen.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Persentase
<b>4.02.001</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
4.02.001.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1 jenis	57,89
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	66,14
4.02.001.208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 unit	10 unit	34,48
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang	16 orang	49,90
4.02.001.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 item	4 item	36,61
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	3 item	3 item	38,04
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	65,14

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang menghasilkan Realisasi seperti tabel 2.3. tersebut ada beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:



- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas realisasi sesuai dengan pengajuan service pemeliharaan dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga BBM yang berlaku.
- b. Pembahasan 16 Raperda yang semula direncanakan, baru terealisasi 4 Raperda.
- c. Reses di rencanakan 3 (tiga) kali terealisasi 2 (dua) kali.
- d. Peningkatan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 50 orang anggota, belum ada yang mengajukan/menjalankan general check up.
- e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak ada penyerapan sehingga realisasinya belum memenuhi target.
- f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah realisasi sesuai biaya tiketing dan penginapan.
- g. Pengembangan fasilitasi komunikasi dan informasi realisasi sesuai release kegiatan DPRD.
- h. Pemeliharaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan sesuai dengan pengajuan dan perpanjangan STNK.

Dari tabel 2.2 tersebut pelaksanaan 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan Sekretariat DPRD terlihat adanya sub kegiatan belum mencapai target yang diharapkan yaitu 70 sampai 100 persen dan tabel 2.3. adalah kegiatan yang target realisasinya 100 persen namun realisasi keuangannya masih dibawah 80 persen. Sedangkan realisasi 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang telah mencapai atau memenuhi target dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.  
Program dan Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)
			Target Renja SKPD Tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	5	6	7	8=(7/6)	9
4.02.001	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
4.02.001.201	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					



Sekretariat DPRD

4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel
4.02.001.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	7 jenis	5 jenis	71,43	7 jenis
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	3 jenis	75,00	4 jenis
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223 kali	85 kali	61 kali	71,76	85 kali
4.02.001.207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis
4.02.001.208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang
4.02.001.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 unit	4 item	4 item	100	4 item
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.215	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>					
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.002	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>					
4.02.002.202	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>					
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.203.01	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					



4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	4 kali
4.02.002.204	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>					
4.02.002.204.02	Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	6 kali	5 kali	83,33	6 kali
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	114 kali	12 bulan	9 bulan	75,00	12 bulan
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75,00	12 bulan
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.206	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>					
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.208	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>					
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77 kali	90 kali	73 kali	81,11	90 kali
4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan realisasi seperti pada tabel 2.1. tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.6.  
Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
1.	Perencanaan dan anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal
2.	Sumberdaya Aparatur	Kurangnya Kualitas Aparatur, Kurangnya Disiplin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnya Disiplin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnya Disiplin
3.	Sarana dan Prasarana	Belum Maksimal	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bintel	Peningkatan Bintel	Peningkatan Bintel



5.	Pendidikan Formal (Bidang Hukum, Komputer, Akuntansi)	Kurang/Tidak Sesuai Bidang	Sesuai Bidang	Peningkatan Aparatur Sesuai Bidang
6.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dari tabel 2.6 diatas terutama faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

1. Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.
2. Faktor sumberdaya aparatur berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan minimnya kualitas aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan, kurangnya disiplin mengakibatkan minimnya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Faktor sarana dan prasarana berimplikasi pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja aparatur baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.
4. Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalisme aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.
5. Faktor pendidikan formal berimplikasi pada kurang profesionalisme dibidangnya, kurangnya pemahaman diakibatkan tidak sesuainya kinerja aparatur dengan latar belakang pendidikan.
6. Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.
2. Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.



4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun sesuai dengan latar belakang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer dan lainnya).
6. Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang seluruh program dan kegiatan baik program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut :

### **2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja anggaran.

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Tersedianya pemenuhan gaji ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Indikator : Tersedianya dokumen laporan keuangan

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan administrasi pegawai



Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator : Jumlah pegawai yang terfasilitasi bimtek.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase tersedianya sarana penunjang kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Tersedianya komponen penerangan kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Tersedianya bahan bacaan.

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator : Terfasilitasinya jamuan makan tamu.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator : Tersedianya laporan kunjungan kerja

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum.

Indikator : Persentase tersedianya mebel.

Sub kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator : Terlaksananya pengadaan mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan jasa komunikasi

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator : Tersedianya jasa komunikasi



Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Tersedianya kebersihan kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan peeliharaan sarana dan prasarana pegawai

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paak Kendaraan Perorangan Danas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator : Tersedianya terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas.

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel

Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan DPRD

Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

Indikator : Tersedianya gaji DPRD.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Indikator : Terlaksananya medical check up

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Indikator : Persentase pemenuhan rapat-rapat.

Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Indikator : Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD.

2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator : Persentase Pembentukan Peraturan Daerah



Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Indikator : Terlaksananya pembahasan pra raperda.

Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Indikator : Tersedianya raperda

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Indikator : Tersedianya naskah akademik

Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib

Indikator : Tersedianya tata tertib

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Indikator : Persentase Pemenuhan Pembahasan Anggaran

Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS

Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS

Sub kegiatan Pembahasan APBD.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD

Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan

Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran

Indikator : Terlaksananya pembahasan laporan semesteran

Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD.

Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator : Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian.



Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan.

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator : Persentase pemenuhan kapasitas DPRD

Sub kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Indikator : Terlaksananya bimtek dewan.

Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Indikator : Terlaksananya publikasi dan dokumentasi.

Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator : Terfasilitasinya kegiatan fraksi.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

Indikator : Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat

Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

Indikator : Tersedianya program kerja DPRD.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator : Persentase pelaksanaan reses.

Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Indikator : Jumlah laporan kunjungan kerja

Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Indikator : Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

Sub kegiatan Pelaksanaan Reses.

Indikator : Jumlah dokumen reses.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik.

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen kode etik

Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.

Indikator : Tersedianya dokumen kode etik.

g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi

Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Indikator : Terlaksananya konferensi pers.

h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator : Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD

Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD

Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator : Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD



Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2019-2023 yang mengacu RJPMD Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalam terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut :



Tabel 2.7.--  
Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPd dan Renstra OPD terhadap RPJMD													
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD													
		Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan	Dok	7	6	7	7	7	7	6	7	4	-	-	
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan													
		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
		Tersedianya dokumen laporan keuangan	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi pegawai													
		Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	Stel	350	350	300	300	300	350	350	300	300			
		Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	Orang	50	32	50	50	50	50	32	50	31			
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor													
		Tersedianya komponen penerangan kantor	Jenis	5	5	1	1	1	5	5	1	1			
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Item	6	7	7	7	7	6	7	5	4			
		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	16	16	7	7	7	16	16	5	5			
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	4	3	3	3	4	4	3	3			



Sekretariat DPRD

	Tersedianya bahan bacaan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	Dus	1969	12100	5000	5000	5000	1948	8695	4061	1100				
	Tersedianya laporan kunjungan kerja	Dok	100	140	85	85	90	100	123	85	61				
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tersedianya mebel													
	Terlaksananya pengadaan mebel	Item	2	1	3	3	3	2	1	1	3				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan jasa komunikasi													
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Unit	9	9	10	10	10	9	9	10	10				
	Terlaksananya petugas kebersihan kantor	Orang	16	16	16	16	16	16	16	16	16				
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai													
	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	item	57	58	4	4	4	57	58	4	4				
	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jenis	5	5	3	3	3	5	5	3	2				
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Item	7	17	15	15	15	7	17	10	6				
	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor	Unit	-	-	1	1	1	-	-	1	1				
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD													
	Tersedianya gaji DPRD	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
	Terlaksananya medical check up	Orang	50	50	50	50	50	38	2	16	-				
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD													
	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	Kali	41	41	95	95	95	41	41	85	50				
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD													
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase pembentukan peraturan daerah													



Sekretariat DPRD

	Terlaksana pembahasan pra raperda	Keg	-	-	5	5	5	-	-	4	1			
	Tersedianya raperda	Perda	10	11	12	13	14	14	8	8	4			
	Tersedianya naskah akademik draf raperda	Dok	-	-	8	8	8	-	-	7	-			
	Tersedianya tata tertib	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	1			
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>													
	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran													
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pembahasan APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>													
	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan													
	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan	Kali	-	-	4	2	2	-	-	3	2			
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>													
	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD													
	Terlaksananya bimtek Dewan	Kali	6	6	6	6	6	6	6	5	5			
	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	Kali dan Bulan	110	110	12	12	12	102	104	106	9			
	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	9			
	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	Kali	10	100	100	100	100	90	100	91	48			



Sekretariat DPRD

		Tersedian program kerja DPRD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase pelaksanaan Reses													
		Jumlah laporan kunjungan kerja	Lap atau kali	21	50	3	3	3	-	50	-	-			
		Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Dok	-	-	100	100	100	-	-	-	-			
		Jumlah dokumen reses	Kali	3	3	3	3	3	2	2	3	2			
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Persentase pemenuhan dokumen kode etik													
		Tersedianya dokumen kode etik	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	1			
	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi													
		Terlaksananya konferensi pers	Kali atau Bulan	72	60	12	12	12	51	34	12	9			
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD													
		Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	Kali	85	85	85	85	90	77	85	85	73			
		Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	-			



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah rencanakan.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu menopang kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD.

Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).



6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.
7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :
  1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
  2. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
  3. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
  4. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
  5. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.
  6. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu Fasilitasi program dan kegiatan terhadap DPRD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan.**

Berdasarkan pagu indikatif KUA PPAS Tahun 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 123.434.209.000,- yang dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 70.076.821.400,-.



Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 53.357.387.600,-

Pada KUA PPAS perubahan 2022 Sekretariat DPRD mengusulkan penambahan anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan yang pada anggaran murni hanya dialokasikan 10 bulan serta adanya usulan penambahan anggaran sub kegiatan fasilitasi kegiatan reses, gaji dan tunjangan ASN diakibatkan adanya pembayaran THR dan gaji ke 13 yang dikeluarkan oleh pemerintah, usulan penambahan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan, penambahan anggaran pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebagai upaya peningkatan fasilitasi terhadap aktivitas dewan. Dengan demikian anggaran Sekretariat DPRD untuk setelah perubahan sebesar Rp. 129.711.130.749,- atau bertambah sebesar Rp. 6.396.895.583,- dari anggaran murni sebesar Rp. 123.314.235.166,-.

Dari anggaran Rp. 129.711.130.749,- dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 74.306.028.149,- atau bertambah sebesar Rp. 3.106.477.683,- dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 71.199.550.466,- sedangkan untuk Program Dukungungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 55.405.102.600,- atau bertambah sebesar Rp. 3.290.417.900,- dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 52.114.684.700,-

Estimasi rincian anggaran perubahan tersebut sesuai kebutuhan untuk 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan dapat dilihat seperti pada tabel :



Tabel 2.8.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Perubahan  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang  
 Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD</b>		74.306.028.149	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD</b>		74.306.028.149	
	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD</b>		113.355.500	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD</b>		113.355.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan	7 dokumen	104.160.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan	7 dokumen	104.160.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	9.195.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	9.195.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan</b>		11.051.820.813	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan</b>		11.051.820.813	



## Sekretariat DPRD

		<b>dokumen laporan keuangan</b>					<b>dokumen laporan keuangan</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	11.043.080.313	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	11.043.080.313	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	1 dokumen	8.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersedianya dokumen laporan keuangan	1 dokumen	8.740.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pegawai</b>		1.469.890.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi pegawai</b>		1.469.890.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	300 stel	865.290.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	300 stel	865.290.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	604.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	604.600.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana penunjang kantor</b>		13.441.202.200	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersedianya sarana penunjang kantor</b>		13.441.202.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	83.094.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	83.094.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	789.000.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	789.000.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	575.045.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	575.045.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	297.481.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	297.481.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	357.538.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	357.538.900	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	713.190.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	713.190.000	



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.851.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.851.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase tersedianya mebel</b>		105.618.800	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase tersedianya mebel</b>		105.618.800	
	Pengadaan Mebel		Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	105.618.800	Pengadaan Mebel		Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	105.618.800	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan jasa komunikasi</b>		534.000.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan jasa komunikasi</b>		534.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	42.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	492.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	492.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai</b>		1.678.812.300	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai</b>		1.678.812.300	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	704.001.800	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	704.001.800	
	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	108.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	108.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 unit	562.010.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 unit	562.010.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000	



Sekretariat DPRD

	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD</b>		44.080.438.435	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD</b>		44.080.438.435
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersedianya gaji DPRD	50 orang	43.901.688.536	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersedianya gaji DPRD	50 orang	43.901.688.536
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD</b>		1.830.890.000	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD</b>		1.830.890.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD</b>		<b>55.405.1202.600</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD</b>		<b>55.405.1202.600</b>
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>Persentase pembentukan peraturan daerah</b>		3.515.496.300	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>Persentase pembentukan peraturan daerah</b>		3.515.496.300
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Terlaksana pembahasan pra raperda	2 kegiatan	464.049.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Terlaksana pembahasan pra raperda	2 kegiatan	464.049.200
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Tersedianya raperda	16 perda	2.300.846.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Tersedianya raperda	16 perda	2.300.846.000
	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Tersedinya tata tertib	1 dokumen	33.858.100	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Tersedinya tata tertib	1 dokumen	33.858.100
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Persentase pemenuhan pembahasan anggaran</b>		975.838.080	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Persentase pemenuhan pembahasan anggaran</b>		975.838.080
	Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	155.769.520	Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	155.769.520



	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	155.769.520	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan APBD		Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	155.769.520	Pembahasan APBD		Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	155.769.520	Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan Laporan Semester		Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.940.000	Pembahasan Laporan Semester		Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.940.000	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 kali	275.820.000	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 kali	275.820.000	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan</b>		1.434.476.000	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan</b>		1.434.476.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	325.896.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	325.896.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	333.078.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	333.078.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	312.714.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	312.714.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	345.048.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	155.769.520	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan	2 kali	117.740.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan	2 kali	117.740.000	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan kapasitas DPRD</b>		9.159.452.000	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan kapasitas DPRD</b>		9.159.452.000	
	Bimbingan Teknis DPRD		Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	1.589.000.000	Bimbingan Teknis DPRD		Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	1.589.000.000	



Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	12 bulan	1.945.980.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	12 bulan	1.945.980.000	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	792.240.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	792.240.000	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	100 kali	4.783.520.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	100 kali	4.783.520.000	
Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersedian program kerja DPRD	1 dokumen	48.712.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersedian program kerja DPRD	1 dokumen	48.712.000	
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Persentase pelaksanaan Reses</b>		8.665.693.120	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Persentase pelaksanaan Reses</b>		8.665.693.120	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan kunjungan kerja	3 kali	643.089.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan kunjungan kerja	3 kali	643.089.000	
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	62.199.320	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	62.199.320	
Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen reses	3 kali	7.960.404.800	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen reses	3 kali	7.960.404.800	
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen kode etik</b>		28.123.100	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen kode etik</b>		28.123.100	
Penyusunan Kode Etik DPRD		Tersedianya dokumen kode etik	1 dokumen	28.123.100	Penyusunan Kode Etik DPRD		Tersedianya dokumen kode etik	1 dokumen	28.123.100	
<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi</b>		141.400.000	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi</b>		141.400.000	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Terlaksananya konferensi pers	12 bulan	141.400.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Terlaksananya konferensi pers	12 bulan	141.400.000	
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD</b>		31.484.624.000	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD</b>		31.484.624.000	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	85 kali	31.420.934.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	90 kali	31.420.934.000	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	63.690.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	63.690.000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 19 Kegiatan dan 51 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2022 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Memperhatikan hal tersebut diatas serta berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan, bahwa Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 tahun kedepan telah menetapkan 3 tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD melalui profesionalisme Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Peningkatan hasil laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD yang akuntabel.
3. Meningkatkan produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD.



Dari 3 tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019–2023. Program-program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis organisasi yang telah disepakati, maka untuk Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 menetapkan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang meliputi 25 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 27 sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas dari 9 kegiatan dengan 25 sub kegiatan, sebagai berikut :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Pengadaan Mebel.
  - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.
    - Pemeliharaan Mebel.
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
    - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
  - 9. Layanan Administrasi DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
    - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- ❖ Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas dari 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan, sebagai berikut :



1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
  - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
  - Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Pembahasan KUA dan PPAS.
  - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
  - Pembahasan APBD.
  - Pembahasan APBD Perubahan.
  - Pembahasan Laporan Semester.
  - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
  - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Bimbingan Teknis DPRD.
  - Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
  - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
  - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
  - Penyusunan Program Kerja DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Kunjungan Kerja dalam Daerah.
  - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
  - Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
  - Penyusunan Kode Etik DPRD.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :



- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,
8. Fasilitasi Tugas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
  - Penyusunan Laporan Kinerja.

Program dan kegiatan seperti tercantum diatas merupakan estimasi kegiatan untuk Tahun 2022 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimungkinkan akan mengalami perubahan apabila dirasa dapat mengakomodir fasilitasi kegiatan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel berikut :



Tabel 3.1.  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD</b>			74.306.028.149				
	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD</b>			113.355.500				157.444.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan		7 dokumen	104.160.500			7 dokumen	146.789.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dokumen	9.195.000			1 dokumen	10.655.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan</b>			11.051.820.813				10.181.716.405
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN		1 dokumen	11.043.080.313			1 dokumen	10.173.666.405
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan		1 dokumen	8.740.000			1 dokumen	8.050.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pegawai</b>			1.469.890.000				1.760.254.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya		300 stel	865.290.000			300 stel	1.430.654.000



			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	604.600.000		52 orang	329.600.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana penunjang kantor</b>		13.441.202.200			20.795.546.500
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	83.094.600		1 jenis	74.362.623
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	789.000.500		7 jenis	527.075.295
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	575.045.900		7 jenis	521.625.473
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	297.481.300		3 jenis	230.706.610
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	357.538.900		4 jenis	231.260.500
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	713.190.000		5000 dus	917.170.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.851.000		88 kali	18.293.346.000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya mebel</b>		105.618.800			101.084.200
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	105.618.800		3 item	101.084.200
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa komunikasi</b>		534.000.000			564.661.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	42.000.000		10 unit	61.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	492.000.000		16 orang	503.061.200
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai</b>		1.678.812.300			1.790.144.208
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	704.001.800		4 item	844.160.000
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000		3 item	57.400.000



			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	108.800.000			15 item	147.087.500
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 unit	562.010.500			1 unit	487.296.708
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000			1 unit	254.200.000
			<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD</b>		44.080.438.435				40.776.686.084
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	50 orang	43.901.688.536			50 orang	40.597.936.084
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000			50 orang	178.750.000
			<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD</b>		1.830.890.000				2.526.705.975
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000			95 kali	2.526.705.975
			<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD</b>		<b>55.405.1202.600</b>				<b>87.980.078.449</b>
			<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase pembentukan peraturan daerah</b>		3.515.496.300				4.349.000.850
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda	5 kegiatan	464.049.200			5 kegiatan	475.680.975
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	16 perda	2.300.846.000			16 perda	2.897.796.975
			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000			8 dokumen	940.800.000
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedinya tata tertib	1 dokumen	33.858.100			1 dokumen	34.722.900
			<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase pemenuhan pembahasan anggaran</b>		975.838.080				1.142.220.225
			Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700



			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan		1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran		2 dokumen	76.940.000			2 dokumen	90.840.000
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD		1 dokumen	275.820.000			1 dokumen	311.057.425
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan</b>			1.434.476.000				1.746.727.100
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum		4 kali	325.896.000			4 kali	390.771.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur		4 kali	333.078.000			4 kali	391.921.050
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat		4 kali	312.714.000			4 kali	424.294.650
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian		4 kali	345.048.000			4 kali	393.064.950
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindakan lanjut pemeriksaan laporan keuangan		4 kali	117.740.000			4 kali	146.675.450
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan kapasitas DPRD</b>			9.159.452.000				6.016.724.600
			Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan		6 kali	1.589.000.000			6 kali	1.961.850.000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi		12 bulan	1.945.980.000			12 bulan	333.205.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi		12 bulan	792.240.000			12 bulan	999.990.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitas hubungan masyarakat		100 kali	4.783.520.000			100 kali	2.671.717.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedian program kerja DPRD		1 dokumen	48.712.000			1 dokumen	49.962.600
			<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan Reses</b>			8.665.693.120				8.295.025.000
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja		3 kali	643.089.000			3 kali	256.250.000



			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		3 kali	62.199.320			3 kali	63.755.000
			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses		3 kali	7.960.404.800			3 kali	7.975.020.000
			<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kode etik</b>			28.123.100				29.549.879
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik		1 dokumen	28.123.100			1 dokumen	29.549.879
			<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi</b>			141.400.000				191.580.000
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers		12 bulan	141.400.000			12 bulan	191.580.000
			<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD</b>			31.484.624.000				66.209.250.795
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD		85 kali	31.420.934.000			90 kali	66.145.560.795
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD		1 dokumen	63.690.000			1 dokumen	63.690.000



### 3.3. Target Kinerja Program dan Kegiatan

Sebagaimana termuat dalam penyusunan rencana kerja yang mengisyaratkan adanya perbaikan dalam pencapaian hasil dari program dan kegiatan, sebagai bahan evaluasi, mampu memperbaiki kinerja jajaran Sekretariat DPRD dan juga menjadi tolok ukur secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, maka untuk Tahun 2022 dengan memperhatikan hasil pencapaian realisasi program dan kegiatan Tahun 2020 yang termuat dalam monev serta dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta, maka perkiraan/estimasi target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel :  
Target Program dan Kegiatan 2022  
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi	
		Fisik (%)	Keu (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	81,07
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	91,42
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95,00	92,80
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	93,60	90,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	91,46
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,90	88,15
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,00	84,24
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,00	87,15
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90,00	81,30
	- Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,00	86,45
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90,00	70,66
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	90,00	85,90



	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,00	89,11
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Pengadaan Mebel	100	89,55
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	90,22
		Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor	100	92,44
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	71,90
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	100	89,90
	-	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	100	73,25
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	77,85
	-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	77,25
	-	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	87,40
8.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	90	89,62
	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	40,10
9.		Layanan Administrasi DPRD		
	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	88,00	85,60
II.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
	-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	90	87,25
	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	90	81,66
	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	90	79,88
	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	90	89,70
2.		Pembahasan Kebijakan Anggaran		
	-	Pembahasan KUA dan PPAS	92,30	90,15
	-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	92,30	90,15



	-	Pembahasan APBD	90,47	88,70
	-	Pembahasan APBD Perubahan	90,47	88,70
	-	Pembahasan Laporan Semester	87,56	85,30
	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	85,72	83,90
3.		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	88,35	82,57
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	88,35	83,15
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88,35	84,00
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	88,35	84,00
	-	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan pemeriksaa Keuangan	88,35	85,17
4.		Peningkatan Kapasitas DPRD		
	-	Bimbingan Teknis DPRD	90,00	84,25
	-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	90,00	71,88
	-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	90,00	88,70
	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	90,00	80,26
	-	Penyusunan Program Kerja DPRD	90,00	89,20
5.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
	-	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	80,00	77,17
	-	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	60,00	57,90
	-	Pelaksanaan Reses	88,30	86,50
6.		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	90,00	73,59
7.		Pembahasan Kerja Sama Daerah		
	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	75,20	71,42
8.		Fasilitasi Tugas DPRD		
	-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	88,00	86,05
	-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	88,00	82,48



## Rencana Tindak Pengendalian

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang dikelola oleh seluruh Bagian sesuai rencana yang telah ditentukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai yang ada dan melibatkan bagian-bagian lainnya dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun demikian kerap kali dalam proses pelaksanaan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel  
Rencana Tindak Pengendalian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Resiko		Penyebab		C/UC	Dampak
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data penyusunan, data kinerja, informasi OPD	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal / eksternal	C	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber anggaran, informasi ASN	Bagian Keuangan	Pagu anggaran, kesiapan data ASN	Internal	C	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Realisasi anggaran, estimasi kebutuhan, koordinasi	Bagian Keuangan	Data realisasi, perhitungan kebutuhan, koordinasi	Internal	C	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Proses ULP, Waktu dan penunjukan lelang	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan, waktu, koordinasi	Bagian Umum	Undangan, waktu, koordinasi	Internal / eksternal	C	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerusakan, ketersediaan komponen	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Kantor	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan, pemesanan, proses penunjukan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aturan terbaru, ketersediaan dan waktu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan koordinasi	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu, adanya kunjungan, jamuan tamu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan kunjungan kerja	Internal / eksternal	C	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Undangan, agenda Banmus, waktu pelaksanaan	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, hasil Banmus	Internal / eksternal	C	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Mebel	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Kerusakan, penggantian	Internal	C	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan, pembayaran, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Anggaran, kebersihan, Pemeliharaan	Bagian Umum	Sumber daya, komunikasi	Internal	C	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan, waktu pajak, koordinasi	Bagian Umum	Koordinasi, pemeliharaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan mebel	Ketersediaan, waktu, perawatan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan, waktu dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumber daya, sumber anggaran	Bagian Keuangan	Waktu, ketersediaan	Internal	C	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumber daya, sumber anggaran	Bagian Keuangan	Koordinasi, Komunikasi waktu,	Internal / eksternal	C	
9.	Layanan Administrasi DPRD						
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Banmus, waktu, sumber daya	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, sumber daya, pembinaan	Internal / eksternal	C	
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA						



1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Per UU	Aturan, waktu, pansus	Internal	C	
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran						
	Pembahasan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD Perubahan	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Laporan Semester	Koordinasi, data realisasi, waktu	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, data keuangan	Semua bagian	C	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Banmus, waktu, realisasi keuangan	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, realisasi keuangan	Internal / eksternal		
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksan Keuangan	Mitra kerja, waktu, laporan keuangan, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD						
	Bimbingan Teknis DPRD	Banmus, sumber daya, stakeholder	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Data kegiatan, media, waktu	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, media	Internal	C	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Regulasi, sumber daya, waktu, laporan	Bagian Persidangan	Komunikasi, sumber daya, waktu	Internal	C	



	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sumber daya, stakeholder, waktu	Bagian Pesidangan	Komunikasi, sumber daya waktu	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Banmus, rencana kerja, waktu, sumber anggaran	Bagian Pesidangan	Komunikasi, waktu, rencana kerja	Internal	C	
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Banmus, sumber daya, pelaporan	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal	C	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Reses, data, stakeholder	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal		
	Pelaksanaan Reses	Reses, data, stakeholder	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal / eksternal		
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, aturan	Internal	C	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah						
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Komunikasi, data kegiatan, waktu,	Bagian Per UU	Komunikasi, data kegiatan	Internal / eksternal	C	
8.	Fasilitasi Tugas DPRD						
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Banmus, tujuan, waktu, laporan	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Banmus, data kinerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	

## Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah untuk membuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan rencana kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang akan direviu oleh Inspektorat Wilayah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memperhatikan arahan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang membuat perjanjian kinerja sebagaimana dibawah ini :



---

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

*Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :*

*Nama : Drs. DADANG NUGRAHA*

*Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang*

*Selanjutnya disebut pihak pertama*

*Nama : A. ZAKI ISKANDAR*

*Jabatan : Bupati Tangerang*

*Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

*Pihak pertama benjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharus sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan*

*Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami*

*Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.*

*Tigaraksa, .....2022.*

*Menyetujui,*

*Bupati Tangerang/Sekretaris Daerah*

*Kabupaten Tangerang*

*Sekretaris DPRD*

*Kabupaten Tangerang*

.....

.....

Perjanjian kinerja seperti tersebut diatas berlaku pula untuk jabatan struktural dilingkup Sekretariat DPRD, secara berjenjang membuat perjanjian kinerja dari eselon III kepada eselon II dan eselon IV kepada eselon III.



Pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kerja yang dibuat disertai dengan lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Terlaksananya pembahasan pra raperda Tersedianya perda Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Tersedianya tata tertib DPRD Jumlah rapat pembahasan KUA PPAS Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Jumlah rapat pembahasan APBD Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD Jumlah rapat pembahasan laporan semesteran Jumlah rapat pembahasan pertanggung jawaban APBD Jumlah rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum Jumlah rapat pengawasan bidang infrastruktur Jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan BPK Terlaksananya kegiatan bimtek Jumlah publikasi dan dokumentasi	5 keg 16 perda 8 dok 1 dok 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 3 kali 6 kali 12 bulan



				Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan
				Jumlah hubungan masyarakat yang difasilitasi	100 kali
				Tersusunnya program kerja DPRD	1 dok
				Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	50 lap
				Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	50 dok
				Jumlah pelaksanaan reses	3 kali
				Tersedianya kode etik DPRD	1 dok
				Jumlah konferensi pers	12 bulan
				Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	85 kali
				Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dok
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang	-		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang tersebar pada Bagian Umum, Bagian Pengawasan dan Penganggaran, Bagian Program dan Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sasaran strategis yang dijabarkan dalam lebih kurang 51 kegiatan dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil serta akan dihitung dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi serta akan di konsultasikan dan di koordinasikan dengan panitia khusus DPRD dalam pembahasan anggaran Tahun 2022.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019–2023. Program-program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis organisasi yang telah disepakati, maka untuk Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 menetapkan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang meliputi 25 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 27 sub kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2022 perubahan yang terdiri 2 program, 17 kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan  
Tahun 2022 Perubahan

No.	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket.
I	SEKRETARIAT DPRD	17	129,711,130,749	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9</b>	<b>74,306,028,149</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113,355,50	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,051,820,813	



3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,469,890,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13,441,202,200	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		105,618,800	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		534,000,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,678,812,300	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		44,080,438,536	
9	Layanan Administrasi DPRD		1,830,890,000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>8</b>	<b>55,405,102,600</b>	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3,515,496,300	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		975,838,080	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1,434,476,000	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		9,159,452,000	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8,665,693,120	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		28,123,100	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		141,400,000	
8	Fasilitasi Tugas DPRD		31,484,624,000	



Tabel 3.1.  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD</b>			74.306.028.149				
	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD</b>			113.355.500				157.444.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan		7 dokumen	104.160.500			7 dokumen	146.789.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dokumen	9.195.000			1 dokumen	10.655.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan</b>			11.051.820.813				10.181.716.405
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN		1 dokumen	11.043.080.313			1 dokumen	10.173.666.405
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan		1 dokumen	8.740.000			1 dokumen	8.050.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi pegawai</b>			1.469.890.000				1.760.254.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya		300 stel	865.290.000			300 stel	1.430.654.000



			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	604.600.000			52 orang	329.600.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana penunjang kantor</b>		13.441.202.200				20.795.546.500
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	83.094.600			1 jenis	74.362.623
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	789.000.500			7 jenis	527.075.295
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	575.045.900			7 jenis	521.625.473
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	297.481.300			3 jenis	230.706.610
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	357.538.900			4 jenis	231.260.500
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	713.190.000			5000 dus	917.170.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.851.000			88 kali	18.293.346.000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya mebel</b>		105.618.800				101.084.200
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	105.618.800			3 item	101.084.200
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa komunikasi</b>		534.000.000				564.661.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	42.000.000			10 unit	61.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	492.000.000			16 orang	503.061.200
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai</b>		1.678.812.300				1.790.144.208
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	704.001.800			4 item	844.160.000
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000			3 item	57.400.000



			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	108.800.000			15 item	147.087.500
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 unit	562.010.500			1 unit	487.296.708
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000			1 unit	254.200.000
			<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD</b>		44.080.438.435				40.776.686.084
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	50 orang	43.901.688.536			50 orang	40.597.936.084
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000			50 orang	178.750.000
			<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD</b>		1.830.890.000				2.526.705.975
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000			95 kali	2.526.705.975
			<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD</b>		<b>55.405.1202.600</b>				<b>87.980.078.449</b>
			<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase pembentukan peraturan daerah</b>		3.515.496.300				4.349.000.850
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda	5 kegiatan	464.049.200			5 kegiatan	475.680.975
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	16 perda	2.300.846.000			16 perda	2.897.796.975
			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000			8 dokumen	940.800.000
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya tata tertib	1 dokumen	33.858.100			1 dokumen	34.722.900
			<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase pemenuhan pembahasan anggaran</b>		975.838.080				1.142.220.225
			Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700



			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan		1 dokumen	155.769.520			1 dokumen	185.080.700
			Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran		2 dokumen	76.940.000			2 dokumen	90.840.000
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD		1 dokumen	275.820.000			1 dokumen	311.057.425
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan</b>			1.434.476.000				1.746.727.100
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum		4 kali	325.896.000			4 kali	390.771.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur		4 kali	333.078.000			4 kali	391.921.050
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat		4 kali	312.714.000			4 kali	424.294.650
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian		4 kali	345.048.000			4 kali	393.064.950
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindakan lanjut pemeriksaan laporan keuangan		4 kali	117.740.000			4 kali	146.675.450
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan kapasitas DPRD</b>			9.159.452.000				6.016.724.600
			Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan		6 kali	1.589.000.000			6 kali	1.961.850.000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi		12 bulan	1.945.980.000			12 bulan	333.205.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi		12 bulan	792.240.000			12 bulan	999.990.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitas hubungan masyarakat		100 kali	4.783.520.000			100 kali	2.671.717.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedian program kerja DPRD		1 dokumen	48.712.000			1 dokumen	49.962.600
			<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan Reses</b>			8.665.693.120				8.295.025.000
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja		3 kali	643.089.000			3 kali	256.250.000



			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		3 kali	62.199.320			3 kali	63.755.000
			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses		3 kali	7.960.404.800			3 kali	7.975.020.000
			<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen kode etik</b>			28.123.100				29.549.879
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik		1 dokumen	28.123.100			1 dokumen	29.549.879
			<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi</b>			141.400.000				191.580.000
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers		12 bulan	141.400.000			12 bulan	191.580.000
			<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD</b>			31.484.624.000				66.209.250.795
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD		85 kali	31.420.934.000			90 kali	66.145.560.795
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD		1 dokumen	63.690.000			1 dokumen	63.690.000



Sekretariat DPRD

---



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023, yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran organisasi yang berada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.